

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus, Cetakan Pertama. Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan ke-9, Jakarta: Djambatan
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Parlindungan, A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP No. 37 Tahun 1998)*. Mandar Maju. Bandung, edisi cetakan ke-4

Perangin, Effendy. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pratama, Bambang. 2017. *Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Oxford: Oxford University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2008. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Urip. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Menuju Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zainal, Asikin. 2021. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

C. JURNAL DAN TESIS

- Agustina & Enny. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Jurnal STIH Pertiba Pangkal Pinang*, Vol. 19, No. 03.
- Assidiqih, Gandi. Tinjauan Yuridis Sertipikat Tanah elektronik Seabagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, 2022.
- Hirwansyaah, E. M. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertifikat Elektronik. *Krtha Bhayangkara*.
- Kusmaryanto, Gunarto. (2017). Pendaftaran Akta Jual Beli. *Jurnal Akta Unissula*, Vol. 4.
- Lumbaraja, R.A. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum. *Notarius*, Vol.13 No.2.
- Mujiborohman, Dian Aries. (2021). Transformasi Dari Kertas ke Elektronik. *Vol. 7 No. 1*.
- Nurmawati, K.H. (2023). Sertifikat-EL Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. *INNOVATIVE Journal*.
- Nabila. Efektivitas Nabila. *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Vol. 6 No. 2.
- Rifan, Umar Ma'ruf. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Jual Beli Tanah. *Jurnal Akta Unissula*, Vol. 4 No. 3.

Riyanto, Tabah, Suardi, dan Abraham Yazdi Martin. 2025. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.” *Postulat: Jurnal Hukum* 3(1)

Syamsuar, S. (2023). Hambatan Sertifikat Elektronik. *Indonesia Journal of Law*, Vol. 6 No. 1.

Wisnu. *Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Elektronik Oleh Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Yani Pujiwati dkk. (1999). Pendaftaran Tanah Negara berdasarkan PP 24/1997. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 1 No.1.

D. ARTIKEL

Kementerian ATR/BPN, “FAQ Sertipikat Elektronik”, diakses melalui <https://www.atrbpn.go.id>

Kompas.com. (2024). *Ini Alasan Sertipikat Tanah Kertas Diganti Elektronik*.

<https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/03/150000721/>

Website BPN Padang. *Visi dan Misi BPN Padang*. <http://kotapadang.atrbpn.go.id/visi-dan-misi>

Website BPS-Statistics Indonesia Padang Municipality
<https://padangkota.bps.go.id/en/publication/2023/09/26/9530925d96b2c4978030e9f3/kecamatan-koto-tengah-dalam-angka-2023.html>